



74
PERUSAHAAN
TANPA IZIN

SITEPLAN
PT FERRY

GARA-GARA SITEPLAN **PT FERRY,** **74 PERUSAHAAN** **TAK PUNYA IZIN**

Bogor | Harian Merdeka — Komisi I DPRD Kabupaten Bogor mengendus keberadaan 74 perusahaan di wilayah Kecamatan Gunung Putri yang tidak memiliki legalitas perizinan alias bodong.

Halaman 11

POLITIK

Setelah Golkar,
PKB Usung
Prabowo Presiden
2029

Halaman 2

PEMERINTAHAN

Bertemu El-Sisi,
Prabowo Dorong
Kolaborasi Industri
Pertahanan
RI-Mesir

Halaman 4

BOLA

Man City 'Cukur'
Liverpool

Halaman 12

Syahganda Usulkan Anies Jadi Menteri Pendidikan



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara terbuka mengusulkan agar Anies Baswedan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Syahganda menyebut posisi Menteri Pendidikan sebagai salah satu jabatan yang layak dipertimbangkan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dalam tayangan kanal YouTube Total Politik yang disiarkan Minggu (11/10/2026), Syahganda menilai Anies memiliki kecocokan untuk mengemban tugas di bidang pendidikan.

"Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok," kata Syahganda. Pernyataan tersebut menjadi sinyal dukungan terbuka dari Syahganda terhadap kemungkinan Anies mengambil peran dalam pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, usulan itu belum menunjukkan adanya keputusan resmi mengenai penempatan Anies dalam jajaran kabinet.

Syahganda menilai, pertimbangan untuk bergabung dalam pemerintahan seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh pengalaman persaingan pada masa lalu.

Ia mengingatkan bahwa ego dan gengsi politik dapat menjadi penghalang ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam agenda pemerintahan.

Ia juga mengaitkan usulannya dengan perjalanan politik Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika Prabowo memberikan dukungan politik kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

"Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi.

Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga," ujarnya. ● (Agus)

Setelah Golkar, PKB Usung Prabowo Presiden 2029

JAKARTA |
Harian Merdeka

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menyatakan partainya mendukung Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2029. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Senin 12 Oktober 2026.

Faisol menilai Prabowo layak melanjutkan kepemimpinan untuk dua periode. Menurut Faisol, dukungan PKB diberikan karena program pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Prabowo dinilai berjalan.

"PKB mendukung 100 persen atau bahkan 1.000 persen pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres 2029, karena memang beliau sangat layak kembali memimpin Indonesia untuk dua periode," ujar Faisol Riza, Wakil Ketua PKB.

Menurut Faisol, program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis hingga sekolah rakyat telah terealisasi, meski masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

"Prabowo berhasil merealisasikan seluruh program kerakyatan, terlepas masih ada kendala, tapi semua diatasi secara baik. Itu bukti bahwa Prabowo ingin rakyat Indonesia maju, tumbuh dengan gizi yang baik, mengenyam pendi-



dikan yang baik, memiliki rumah yang layak," ujar Faisol Riza, Wakil Ketua PKB.

Faisol melanjutkan bahwa program pemerintah tersebut mulai memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap melalui berbagai kebijakan Presiden.

"Semua itu mulai terealisasi dengan baik. Semua yang seharusnya didapatkan rakyat mulai terpenuhi secara bertahap melalui program-program Presiden," ujar Faisol Riza, Wakil Ketua PKB.

Faisol kembali menegaskan alasan PKB memberikan dukungan penuh kepada Prabowo untuk maju pada Pilpres 2029.

"Kalau saya bilang PKB 1.000 persen mendukung Prabowo Subianto maju capres 2029 tanpa alasan, kan tidak logis, padahal alasannya sangat banyak, dan memang beliau pantas memimpin kembali Indonesia," ujar Faisol Riza, Wakil Ketua PKB.

Faisol berharap Prabowo mengetahui

masih adanya dukungan masyarakat untuk kembali maju. Ia menyebut dukungan dapat disampaikan langsung maupun melalui partai politik.

"Jangan sampai beliau berpikiran rakyat sudah tidak mendukung. Padahal, rakyat mendukung beliau untuk maju kembali memimpin Indonesia. Baik diutarakan secara langsung maupun melalui partai politik," ujar Faisol Riza, Wakil Ketua PKB.

Sebelum PKB, Partai Golkar juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo sebagai calon presiden 2029. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut posisi partainya telah jelas terkait calon presiden.

"Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," ujar Ahmad

● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Mahfud MD: Pak Prabowo, Jangan Lindungi Gibran!

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menghalangi proses konstitusional dalam polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai persoalan tersebut menjadi momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap konstitusi.

Dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, Mahfud mengatakan Prabowo tidak perlu mengarahkan partai politik untuk mengambil langkah tertentu. Presiden cukup memastikan tidak ada hambatan terhadap proses yang ditempuh sesuai mekanisme konstitusional.

"Kalau Pak Prabowo mau dorong tegakkan aturan, lak-

sanakan dengan benar agar tidak sewenang-wenang. Cukup mengatakan 'saya tidak akan menghalangi', itu bisa jalan," kata Mahfud.

Ia menyarankan Prabowo menyampaikan sikap tersebut secara langsung kepada partai-partai politik agar proses konstitusional dapat berjalan tanpa intervensi yang menghambat.

"Panggil partai (dan sampaikan): 'Saya tidak menghalangi Anda. Ini konstitusi, ini masalah peradaban yang sudah kita bangun 80 tahun lebih,'" ujarnya.

Mahfud menegaskan, sikap Presiden memiliki pengaruh terhadap dinamika politik dalam penyelesaian polemik Gibran. Menurut dia, proses konstitusional akan sulit berjalan apabila kepala negara justru menghalangi langkah politik yang ditempuh partai-partai.

"Tapi kalau Pak Prabowo menghalangi, ya tidak bakal



jalan," kata Mahfud.

Ia memandang situasi ini sebagai kesempatan bagi Prabowo untuk memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan aturan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

Mahfud juga menyinggung pengalaman Prabowo menghadapi dinamika dan sengketa pemilu pada masa lalu. Pengalamannya tersebut, menurutnya, dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas proses demokrasi.

Hukum Jangan Kalah oleh Program Pemerintah

Mahfud turut mengaitkan persoalan penegakan hukum dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu pro-

gram unggulan pemerintahan Prabowo.

Ia mengakui peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan penting. Namun, menurut Mahfud, keberhasilan program pemerintah harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik, pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum dan demokrasi.

"Tidak ada gunanya rakyat kenyang kalau peradaban hukum dan demokrasinya itu buruk. Mengenyangkan rakyat dengan MBG itu bagus, silakan asal jangan ada korupsinya. Tapi peradaban, demokrasi, dan hukum itu harus ditegakkan, dan kuncinya ada di tangan Pak Prabowo," tegasnya. ● (Egi)

Kontroversi Syarat Pendidikan Wapres, Denny JA Soroti Legitimasi hingga Skenario Politik



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka perdebatan baru tentang masa depan politiknya. Penulis dan pengamat politik Denny JA menguraikan tiga skenario yang mungkin berkembang setelah putusan tersebut, yakni pemakzulan melalui mekanisme konstitusional, pengunduran diri secara sukarela, atau Gibran tetap menjabat dengan diikuti pembenahan sistem verifikasi persyaratan calon pemimpin.

Dalam tulisan yang disampaikan melalui akun Facebook-nya, Denny JA menilai perkara tersebut menyisakan pertanyaan substantif meskipun permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut dia, putusan itu harus dibaca dengan membedakan pertimbangan mengenai bukti pendidikan dan keputusan prosedural mengenai kedudukan hukum para pemohon.

Denny menekankan bahwa MK tidak membatalkan jabatan Gibran, tetapi juga tidak dapat disimpulkan telah menyatakan seluruh persoalan persyaratan pendidikannya terbukti terpenuhi.

Kontroversi tersebut berkaitan dengan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menilai bukti yang diajukan belum meyakinkan untuk menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang

dapat menjadi dasar penyeteraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut setelah tahapan pemilihan berakhir dan ia dilantik sebagai wakil presiden.

Skenario pertama yang dibahas Denny adalah pemakzulan melalui mekanisme konstitusional. Ia menilai jalur ini menghadapi hambatan hukum dan politik yang besar. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian wakil presiden memerlukan proses yang melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR. Karena itu, pertimbangan dalam putusan sengketa sebelumnya tidak otomatis menjadi

dasar yang cukup untuk mem-berhentikan Gibran. Diperlukan pengujian tersendiri mengenai dasar hukum dan terpenuhinya alasan pemberhentian sebagaimana diatur konstitusi.

Skenario kedua adalah Gibran mengundurkan diri secara sukarela. Menurut Denny, pilihan tersebut secara politik dapat dipandang sebagai langkah untuk meredakan kontroversi, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan substantif yang diperdebatkan. Pengunduran diri juga bukan konsekuensi yang diwajibkan oleh putusan MK. Apabila jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Namun, mekanisme pergantian jabatan itu tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan.

● (Egi)

Wamensos Agus Jabo sebut Dapodik Jadi Fondasi Tata Kelola Sekolah Rakyat



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola pendidikan dan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

“Dapodik bukan hanya urusan data, tetapi Dapodik adalah kunci,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menutup Pelatihan Pengelolaan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Operator Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (10/10).

Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Agus Jabo menjelaskan salah satu kendala yang selama ini memengaruhi ketepatan program pemerintah adalah data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Akibatnya, program yang dijalankan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berupaya menyatukan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar pelaksanaan program. Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola dan sistem pendidikan Sekolah Rakyat.

“Data yang salah menyebabkan apa yang kita programkan, apa yang kita kerjakan, tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Agus Jabo juga menyoroti masih adanya anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Kalau yang mampu bisa membiayai sekolahnya sendiri, tentunya yang tidak mampu, yang miskin, yang kurang mampu, negara yang harus menjemput mereka, yang harus mendampingi mereka,” ujarnya. ● (Egi)

Bertemu El-Sisi, Prabowo Dorong Kolaborasi Industri Pertahanan RI-Mesir



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Indonesia dan Mesir sepakat untuk semakin mendorong kerja sama di sektor industri pertahanan. Keputusan ini terjalin dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Prabowo mengatakan, kolaborasi RI-Mesir di industri pertahanan nantinya bakal diterapkan melalui pelatihan hingga pertukaran pandangan antar pemimpin maupun pakar dari kedua negara di sektor bersangkutan.

“Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang industri pertahanan, dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita,” ujar Prabowo.

Prabowo turut mengu-

capkan terima kasih kepada Mesir dan Presiden El-Sisi atas kerja sama erat yang telah terjalin, hingga pemberian bantuan yang telah digelontorkan pada industri pertahanan.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap dukungan Mesir dalam membantu dan memberi fasilitas kebutuhan kapal-kapal TNI angkatan laut kita yang bertugas menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah,” ungkapnya.

Adapun dalam pertemuan antara Prabowo dan Presiden El-Sisi, kedua pemimpin tertinggi negara juga punya pemikiran serupa dalam penguatan kolaborasi antar negara di tengah peliknya situasi global saat ini.

“Presiden El-Sisi dan saya juga bertukar pandangan mengenai isu-isu global dan regional. Kami menekankan pentingnya kedua negara ini untuk selalu berkoordinasi berkonsultasi dan beker-

jasama di berbagai forum internasional,” imbuh Prabowo.

RI 1 menilai semangat persaudaraan antara RI-Mesir telah terjalin dengan sangat lama. Seperti diketahui, Mesir merupakan salah satu negara paling awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 1946.

Prabowo pun meyakini hubungan dengan Mesir bakal terus terjalin semakin erat, seraya memberi manfaat nyata bagi kedua negara. Oleh karenanya, ia turut meminta Presiden El-Sisi memposisikan Indonesia sebagai rumah keduanya.

“Kami terus berharap yang mulia akan kembali ke Indonesia dengan membawa keluarga. Kita berharap kita bisa tinggal lebih lama di Indonesia, supaya kita bisa lebih mendekatkan pandangan-pandangan kita lagi. Anggaplah Indonesia adalah rumah presiden el sisi yang kedua,” tutur Prabowo. ● (Egi)

Demo di Kejaksaan, Aktivis Desak Tersangka Kasus Register 44 Segera Ditetapkan



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAMBAKA) kembali menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI, Senin (12/10/2026). Mereka menuntut Kejaksaan segera menetapkan tersangka dalam kasus Register 44 Way Kanan, Lampung, dan meminta Jaksa Agung dicopot dari jabatannya.

Massa menilai penanganan perkara berjalan tanpa kepastian. Menurut mereka, muncul informasi pengembalian uang hingga triliunan rupiah yang dikaitkan dengan PT Inhutani V, tetapi belum ada satu pun tersangka yang diumumkan.

Kordinator ALAMBAKA, Sudirman Dewa, menegaskan bahwa publik berhak tahu sejauh mana proses

hukum berjalan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ia mempertanyakan alasan belum adanya tersangka jika pengembalian dana itu benar terjadi.

ALAMBAKA juga menyoroti rekening PT PSMI yang disebut sempat dibekukan, dibuka kembali, lalu ditutup lagi. Ia meminta Kejaksaan menjelaskan dasar hukum dan kepentingan di balik keputusan tersebut agar tidak memicu spekulasi.

Sementara itu, ALAMBAKA mengingatkan agar Kejaksaan tidak dicap lemah saat menghadapi perkara besar. Ia meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum, dan masyarakat tidak dibiarkan bertanya-tanya tanpa jawaban.

ALAMBAKA juga menyoroti pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat

seperti mantan Bupati Way Kanan, Bustami Zainuddin, Kablabadi, Jamhuri, Edison, Sri, Cahyo, Maisyarah dll untuk ditelusuri lebih jauh keterlibatan aktor aktor tersebut dan mendesak untuk dilakukan pengembangan penanganan perkara penanganan penanganannya secara terbuka.

Karena itu, ALAMBAKA menuntut Jaksa Agung dicopot sebagai bentuk kritik atas kinerja Kejaksaan yang dinilai belum tegas. Massa menegaskan bahwa kasus Register 44 tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dan langkah administratif.

Kini Kejaksaan didesak memberikan penjelasan resmi dan langkah hukum yang terukur. Bagi massa aksi, kejelasan kasus ini menjadi ujian komitmen penegakan hukum di kawasan Register 44 Way Kanan. ● (Egi)



Pemerintah Bentuk Satgas Karhutla, KSP Listyo Sigit Sebut TNI-Polri Dikerahkan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit, mengatakan pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden kata Listyo juga telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga Manggala Agni untuk bekerja sama dalam upaya pemadaman.

"Kami kan sedang melaksanakan berbagai macam pantauan yang jelas ini menjadi kajian untuk mengambil langkah terbaik. Tapi yang jelas presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah terbaik untuk penyelesaian karhutla," kata Listyo Sigit di Istana Kepresidenan, Minggu (11/10/2026).

Lebih lanjut, Sigit mengatakan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat penanganan karhutla. Satgas darat dan udara akan dikerahkan untuk membantu memadamkan api.

"Mulai dari Satgas udara, Satgas darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan Badan Restorasi Gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar Karhutla betul-betul bisa diminimalkan," kata dia

Sebagai informasi, hingga Sabtu (10/10) pukul 21.00, Kementerian Kehutanan mencatat ada 793 titik api karhutla yang terdeteksi secara nasional. Angka ini meningkat dibandingkan pada Jumat kemarin yang tercatat sebanyak 437 titik.

Berdasarkan data pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, perkembangan hotspot high confidence tercatat ada 288 titik di Kalimantan Tengah, 60 titik di Sumatera Selatan: 60 titik, 44 titik di Kalimantan Barat, 28 titik di Kalimantan Selatan, 1 titik di Jambi dan di Riau nihil. ● (Egi)

Bareskrim Usut Dugaan Penipuan Investasi Emas Divine Gold, 86 Korban Rugi Rp25 Miliar

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Bareskrim Polri mengusut dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam investasi emas dan perak yang melibatkan PT Divine Gold Jewelry, yang juga dikenal sebagai PT Divine Gems and Jewellery atau Nellava Bullion.

Kasus tersebut dilaporkan oleh sekitar 85 hingga 86 korban dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp25 miliar. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/476/X/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan tersebut, sejumlah petinggi perusahaan menjadi sorotan, di antaranya Direktur Utama berinisial JKR yang merupakan warga negara asing dan Komisaris berinisial NB yang berkewarganegaraan Indonesia. Selain itu, terdapat dugaan keterlibatan empat warga negara asing asal India yang turut menjadi perhatian dalam

penyelidikan.

Modus yang diduga digunakan adalah skema pre-order (PO) logam mulia dengan iming-iming bonus besar dan harga buyback tinggi. Salah satu penawaran yang disebutkan adalah pembelian emas 5 gram dengan bonus tambahan 4 gram. Namun, pesanan emas maupun pencairan dana yang dijanjikan kepada korban disebut tak kunjung terealisasi.

Kasus ini turut menjadi perhatian publik karena sejumlah artis dan figur publik diduga pernah mempromosikan investasi tersebut melalui media sosial. Kuasa hukum korban, Bionda Johan Anggara, menyebut promosi para pesohor menjadi salah satu faktor yang membuat korban percaya dan tertarik menanamkan modal. Nama yang disebut antara lain Jennifer Coppen (JC), Kirana Larasati (KL), Nopek Novian (NN), serta tokoh publik asal Bali berinisial AWK.



Menanggapi namanya yang ikut terseret, Jennifer Coppen menyatakan keterlibatannya sebatas hubungan profesional sebagai brand ambassador, sesuai kontrak untuk pembuatan konten dan menghadiri acara. Ia juga menegaskan tidak menerima komisi dari transaksi serta tidak terlibat dalam operasional maupun aliran dana perusahaan.

Sementara itu, Kirana

Larasati menyatakan telah mengakhiri kontrak kerja sama sebagai brand ambassador perusahaan tersebut. Ia menyampaikan empati kepada pelanggan yang terdampak dan menyatakan kesediaannya untuk kooperatif serta memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri jika diperlukan guna memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

● (Agus)

Didakwa TPPU Kasus Tol MBZ, Febrie Adriansyah Disebut Terima Rp8 Miliar dari Waskita Beton



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dakwaan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie Adriansyah mengungkap penerimaan dana sebesar Rp8 miliar lebih dari PT Waskita Beton Precast Mandiri.

Dana tersebut disebut berkaitan dengan penanganan perkara

dugaan korupsi proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, ruas Cikunir-Karawang Barat, atau Tol Layang MBZ.

Dalam pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terungkap bahwa penerimaan dari perusahaan tersebut dilakukan sebanyak empat kali dengan total menca-

pai Rp8.000.743.603.00

Angka tersebut menjadi salah satu bagian yang disorot dalam uraian dakwaan mengenai dugaan aliran dana yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi proyek infrastruktur strategis tersebut. JPU menguraikan, terdakwa melalui Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin mendirikan sejumlah perusahaan dan/atau mengambil alih perusahaan melalui penempatan modal maupun pembelian saham. Selain itu, terdakwa juga disebut mendirikan yayasan.

Melalui sejumlah perusahaan dan yayasan tersebut, terdakwa bersama Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Pola pendirian dan pengambilalihan perusahaan serta pembentukan yayasan itu menjadi bagian dari konstruksi perkara yang dipaparkan jaksa

dalam dakwaan TPPU terhadap Febrie Adriansyah.

Sementara itu, penerimaan dana dari PT Waskita Beton Precast Mandiri dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi proyek Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol Layang MBZ, yang mencakup ruas Cikunir hingga Karawang Barat.

Besarnya nilai penerimaan yang disebut dalam dakwaan menempatkan hubungan antara aliran dana dan penanganan perkara Tol Layang MBZ sebagai salah satu aspek penting yang terungkap dalam persidangan.

Meski demikian, uraian tersebut merupakan materi dakwaan jaksa yang harus diuji melalui proses persidangan. Pembuktian mengenai asal-usul dana, tujuan pemberian, serta keterkaitannya dengan penanganan perkara tetap menjadi bagian dari proses hukum. ● (Egi)

Guru Ponpes di Bekasi Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Korban Lebih dari 10 Orang



BEKASI |
Harian Merdeka

Polres Metro Bekasi Kota menetapkan seorang pria berinisial MHH (28), yang berprofesi sebagai guru di sebuah pondok pesantren, sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Bekasi Selatan.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pelayanan Perempuan dan Orang (PPO) Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait, mengatakan bahwa tersangka telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik pada Jumat.

“Berdasarkan hasil penyidikan, MHH telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami mendalami dugaan perbuatannya, termasuk hubungan yang bersangkutan dengan korban serta kedudukannya

di lingkungan pesantren,” kata Rosdiana di Bekasi, Jumat (09/10/2026).

Berdasarkan keterangan salah satu korban, MHH telah mengenalnya sejak 2023, ketika korban masih menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Korban juga menyebutkan bahwa MHH menjabat sebagai ketua pondok pesantren.

Saat ini, penyidik masih mencocokkan keterangan tersangka dengan keterangan korban, para saksi, serta alat bukti yang sah guna memperjelas dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Selain memeriksa MHH, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan tiga orang lainnya. Salah satu di antaranya diketahui merupakan petugas keamanan pesantren. Penyidik masih menelusuri peran masing-masing pihak untuk memastikan keterlibatan mereka dalam

kasus tersebut.

“Kami terus mengembangkan perkara ini untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Setiap perkembangan akan disampaikan berdasarkan hasil penyidikan, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kerahasiaan identitas korban,” ujar Rosdiana.

Polres Metro Bekasi Kota masih mengusut kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren wilayah Bekasi Selatan tersebut. Berdasarkan informasi dalam penanganan perkara, jumlah korban yang teridentifikasi disebut lebih dari 10 orang.

Polisi terus mendalami perkara ini untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana serta memastikan proses hukum berjalan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap para korban. ● (Egi)

Perkara Gas Portable, LBH Peradi Minta KY Monitor PN Jakut

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPN PERADI Profesional resmi mengajukan permohonan pemantauan persidangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI). Langkah ini diambil guna mengawal kasus dugaan kriminalisasi dan rekayasa perkara yang menimpa Gabriel Lumbantoran alias Gabriel Sihombing, seorang buruh pabrik asal Cikarang, Bekasi.

Gabriel saat ini berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara nomor 666/Pid.Sus-LH/2026/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait pengisian ulang (refill) gas portable. Ia didakwa menggunakan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yang diubah menjadi Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) atau Pasal 32 ayat 2 jo. Pasal 31 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Gabriel terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Indikasi Rekayasa Kasus dan Pelanggaran Prosedur

Tim Advokat LBH Peradi Profesional mengajukan pengaduan ke Komisi Yudisial dihadiri oleh Kuasa hukum Terdakwa, Moch. Ainul SH, Marulitua Rajagukguk, S.H. dan Juhari Siahaan, S.H., M.H., mengungkapkan sejumlah kejanggalan fatal yang terungkap selama fakta persidangan:

Pertama, Diduga Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Undercover Buy: Oknum anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok diduga menggunakan surat perintah pembelian terselubung (undercover buy) yang tidak sah. Sesuai Pasal 16 ayat 1 KUHAP, metode ini hanya legal untuk kasus narkoba dan psikotropika, dan surat perintah undercover buy untuk kasus prostitusi, bukan untuk perkara minyak dan gas bumi.

Kedua, Diduga Penyidik Melakukan Rekayasa Kasus: Tiga saksi polisi penangkap yang juga bertindak sebagai penyidik mengklaim melihat terdakwa memindahkan isi LPG 3kg ke gas portable, namun keterangan tersebut terbukti tidak benar dipersidangan karena para saksi polisi penangkap tidak pernah melihat terdakwa melakukan penyalahgunaan LPG 3Kg.

Ketiga, Benturan Kepentingan: Hakim menolak keberatan kuasa hukum saat penyidik merangkap menjadi saksi penangkap, yang berpotensi melahirkan kesaksian tidak objektif.

Keempat, Ketidakadilan dan Pemborosan Anggaran: Nilai perkara ini hanya berkisar ratusan ribu rupiah. Menurut Ahli Hukum Pidana dan Ahli Meteorologi Legal di persidangan, kasus administratif seperti ini seharusnya diselesaikan lewat pembinaan, bukan pemenjaraan. Proses hukum yang dipaksakan ini dinilai merugikan keuangan negara akibat pemborosan anggaran penyidikan hingga persidangan. ● (Egi)

PENAMPILAN TERBARU JENNIFER DUNN BIKIN CURI PERHATIAN

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Masih ingat dengan Jennifer Dunn? Istri Faisal Haris itu, baru saja merayakan ulang tahun ke-37 lo. Penampilannya bikin curi perhatian.

Penampilan Jennifer Dunn ini mencuri perhatian. Netizen langsung melontarkan pujian untuknya. Rambut yang terurai dengan badan yang langsing menjadi pusat perhatian netizen. Foto: dok instagram Jennifer Dunn

“cantiiiiikkk bangeeetttt,” jelas akun etrs****. “My girl just keeps getting better with time,” beber akun tre****. “Happy birthday kak. Bahagia selalu yaaa kak,” kata akun lainnya. Foto: dok instagram Jennifer Dunn

Jennifer Dunn adalah selebritas yang pernah membintangi film dan beberapa series di Jakarta. Namun kini, Jennifer memilih untuk menepi dari dunia hiburan Indonesia. Ini kebersamaan Jennifer Dunn dengan suaminya, Faisal Haris. ● (dth)



Soal Skema Prasmanan MBG, Ini Catatan dari Irma Suryani Komisi IX

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penerapan sistem prasmanan.

Sistem ini dinilai mampu menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Langkah BGN ini pun menjadi perbincangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, sebanyak 60 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG menjadi lokasi uji coba (pilot project) inovasi tersebut. Uji coba mulai berjalan pada Senin (5/10/2026).

"Pada tanggal 5 ini, kita sudah melakukan uji coba di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Makanan dibawa dalam keadaan hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas. Ini sedang kita uji coba," kata Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya, @sudarususdaryono, Selasa (6/10/2026).

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, evaluasi dilakukan setiap hari dengan melibatkan SPPG dan sekolah yang menjadi lokasi uji coba.

"Ini baru berjalan tiga hari sejak 5 Oktober. Evaluasi tentu



kami lakukan setiap hari, baik terhadap SPPG maupun sekolah," ujar Tysa, Rabu (7/10/2026), dikutip dari Kontan.

Untuk memperkuat evaluasi, BGN juga menerjunkan tim ke sejumlah SPPG dan sekolah. Tim tersebut memeriksa pelaksanaan skema prasmanan, sekaligus memastikan pengisian format pelaksanaan berjalan sesuai dengan kebutuhan evaluasi.

"Saat ini, tim dari BGN tengah menyebar ke beberapa SPPG

dan sekolah yang menjadi lokasi uji coba untuk memeriksa pelaksanaan dan pengisian format pelaksanaan," kata Tysa.

Selain belum merilis data hasil evaluasi, BGN juga belum mengumumkan secara terperinci daftar sekolah yang menjadi lokasi uji coba dari lebih dari 60 SPPG tersebut. BGN masih melakukan pemantauan di sejumlah SPPG dan sekolah yang menjadi lokasi uji coba dalam beberapa hari ke depan untuk

memperoleh hasil evaluasi yang lebih lengkap.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendukung langkah Pemerintah yang mewacanakan penerapan sistem prasmanan dalam distribusi MBG. Menurut dia, sistem prasmanan dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas memadai.

"Pemberian makanan bisa dilakukan secara prasmanan di dapur masing-masing yang lokasinya tidak berjauhan," ujar Irma Suryani, Jumat (9/10/2025).

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Malang, Andhyka Muttaqin berpandangan wacana penerapan sistem prasmanan berpotensi memperbaiki pengalaman makan siswa, memberikan keleluasaan dalam mengambil makanan, dan mengurangi sisa makanan. Namun, menurut dia, sistem prasmanan belum menyelesaikan persoalan utamanya.

"Pemerintah harus memprioritaskan pembenahan tata kelola MBG agar program ini benar-benar aman, bergizi, akuntabel, dan mampu memperoleh kembali kepercayaan masyarakat," jelas Andhyka melalui pesan WhatsApp, Jumat (9/10/2026).

● (Egi)

Iklan Mini Merdeka

Pasang Iklannya Disini...

Telp/Fax : (021) 59728637 | harianmerdekaredaksi@gmail.com

Media Tepat Untuk Promosi Bisnis Anda

Properti Otomotif Lowongan Kerja Jasa & Servis Jual Beli Lain-lain

LOWONGAN KERJA

- Staff Administrasi
- Sales Marketing
- Kurir / Driver
- Operator Produksi

Kualifikasi :

- Pria/Wanita
- Usia 18 - 35 tahun
- Pendidikan min. SMA/SMK
- Disiplin & Berprestasi

RUMAH DIJUAL

SIAP HUNI • LOKASI STRATEGIS

LT 90 m² | LB 70 m²

2 Kamar Tidur

1 Kamar Mandi

SHM - Akses Kendaraan

Harga Rp 650 Juta (Negotiable)

RUMAH DISEWAKAN

3 Kamar Tidur

2 Kamar Mandi

Ruang Tamu & Dapur

Lingkungan Aman & Nyaman

Akses Keluar - Jakarta Barat

Rp 45 Juta/Tahun

TANAH/KAVLING DIJUAL

Luas mulai 100 - 500 m²

Akses jalan lebar

Lokasi strategis

SHM / Gerdikot

Harga Mulai Rp 3,5 Juta/m²

RUKO DIJUAL

COCOK UNTUK USAHA

LT 80 m² | LB 160 m²

2 Lantai

Lokasi ramai

Akses mudah

Rp 1,8 Miliar (Negotiable)

APARTEMEN

DIJUAL / DISEWAKAN

Lokasi Premium

Fasilitas Lengkap

Kompleks 24 Jam

Dekat Pusat Kota

Harga Mulai Rp 450 Juta

MOBIL BEKAS BERKUALITAS

Toyota Avanza 2022

- Automatic
- Kondisi istimewa
- Pajak Hidup
- Siap Pakai

Rp 185 Juta

MOTOR BEKAS TERPERCAYA

Honda Beat 2023

- Surat Lengkap
- Kondisi Mulus
- Pajak Hidup
- Siap Pakai

Rp 16,5 Juta

DEALER MOBIL BARU & BEKAS

- Cash & Kredit
- Proses Cepat
- DP-Ringan
- Banyak Pilihan Unit

TUKAR TAMBAH

BENGKEL MOBIL

SERVIS • SPAREPART • TUNE UP

Gasol / Diesel • Turin / Bensin

AC Mula • Relinekiri

SERVIS CEPAT & BERGARANSI

SPAREPART & AKSESORIS

MOBIL • MOTOR

- Suku Cadang Original & Aftermarket
- Harga Terbaik
- Tersedia Berbagai Merek

AYO SHOLAT JUM'AT

DI MASJID JAMI' AL IKHLAS

MASJID TRANSIT 24 JAM

Test Ujara untuk Umrah

UNDANGAN TERBUKA

MAKAN NASI KEBULI MAKLUKAB GRATIS 150 PORSI

SETELAN SHOLAT JUM'AT

Menu Khas: Makhluqab

Donasi Infaq

0821-1113-1236

0878-1764-8552

Soroti Fiskal Kab. Serang di Usia 500 Tahun, CDC Gelar Dialog Interaktif

SERANG | **Harian Merdeka**

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 Kabupaten Serang, Creative Democracy Center (CDC) menyelenggarakan dialog interaktif bertajuk “Menguji Fiskal Kab. Serang: Antara Pendapatan Daerah dan Arah Pembangunan” pada Sabtu, 10 Oktober 2026, bertempat di Leadegh Caffé.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi publik untuk membahas pengelolaan fiskal daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Serang dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Momentum lima abad Kabupaten Serang dinilai sebagai kesempatan penting untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dialog interaktif tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, yakni Dr. H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.AP., M.M.; Ketua DPRD Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha, S.H., M.H., M.Si.; Kepala BAPENDA Kabupaten Serang, Devid Hermawan, S.T.,



M.M.; serta Bang Gaos (BG), selaku tokoh muda Banten. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memperkaya perspektif mengenai hubungan antara kapasitas pendapatan daerah, kebijakan anggaran, dan prioritas pembangunan.

Dalam forum tersebut, isu fiskal daerah menjadi perhatian utama, khususnya mengenai bagaimana pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal dan diterjemahkan menjadi program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dialog ini juga membuka ruang bagi pertukaran gagasan dan pan-

dangan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Sahrul Ramadhan selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menjadi bagian dari peringatan HUT ke-500 Kabupaten Serang, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi pemuda dalam mendorong budaya diskusi yang kritis, konstruktif, dan berbasis kepentingan masyarakat.

“Peringatan 500 tahun Kabupaten Serang harus menjadi momentum refleksi bersama. Kita tidak cukup

hanya merayakan panjangnya perjalanan sejarah, tetapi juga perlu berani mendiskusikan bagaimana daerah ini mengelola pendapatannya, menentukan prioritas anggaran, dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui dialog ini, kami ingin mendorong ruang diskusi yang terbuka, agar kebijakan publik dapat terus dikawal secara kritis dan bertanggung jawab,” ujar Sahrul Ramadhan.

Sementara itu, Idan Wildan selaku Founder sekaligus Direktur Eksekutif Creative Democracy Center (CDC) menegaskan pentingnya ruang dialog publik sebagai sarana mempertemukan pemangku kebijakan, kalangan pemuda, dan masyarakat dalam membahas persoalan strategis daerah.

Menurutnya, diskusi mengenai fiskal daerah perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi substantif. Sebab, pembangunan bukan hanya persoalan besarnya anggaran atau tingginya pendapatan daerah, melainkan juga menyangkut ketepatan prioritas, kualitas pelaksanaan program, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat. ● (Egi)

Kantah Tangsel Serahkan 10 Sertipikat Aset Negara, Perkuat Kepastian Hukum BMN



SERANG | **Harian Merdeka**

Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan menyerahkan 10 sertipikat Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya mempercepat legalisasi aset negara

dan memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Penyerahan sertipikat tersebut berlangsung dalam kegiatan serah terima sertipikat tanah BMN sekaligus monitoring dan evaluasi progres sertifikasi aset negara di wilayah Tangerang Raya. Kegiatan digelar di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, Jumat (9/10).

Kantah Tangsel diwakili Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, David Agam.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala KPKNL Tangerang II Desak Putu Jeny, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Provinsi Banten Kusuma Santi Wahyuningsih, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Harison Mocodompis.

Dalam arahannya, Harison menegaskan bahwa sertifikasi tanah BMN tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administrasi.

Sertifikasi merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset negara.

“Jika kita masih berpikir bahwa mengerjakan sertifikasi hanya sekadar memenuhi kewajiban sebagai instansi yang mengelola tanah, maka levelnya sudah naik. Sertipikat is a must,

sertifikat wajib. Tidak boleh kita tidak lakukan,” tegas Harison.

Menurutnya, sertifikasi tanah juga memiliki dampak terhadap aspek ekonomi.

Legalitas yang jelas diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset negara secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dari total 36 sertipikat yang diperuntukkan bagi aset negara pada Tahun Anggaran 2026, Kantah Tangsel menyerahkan 10 sertipikat. Aset yang disertifikasi mencakup tanah untuk bangunan pemerintah serta lahan yang digunakan dalam pembangunan jalan nasional dan jalan tol.

● (Agus)

Brigjen Zain Dwi Nugroho, Perwira Berpengalaman Reserse yang Kini Jabat Wakapolda Banten

SERANG | **Harian Merdeka**

Rotasi kepemimpinan di tubuh Kepolisian Daerah (Polda) Banten resmi bergulir. Jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Banten kini resmi diemban oleh Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, seorang perwira tinggi berpangkat bintang satu dengan rekam jejak panjang di kepolisian.

Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1997 yang banyak mengasah keahlian serta kepemimpinannya di bidang reserse kriminal. Sepanjang kariernya, Zain dikenal sebagai sosok pimpinan yang berpengalaman dalam menangani berbagai penegakan hukum dan penanganan wilayah urban yang dinamis.

Sebelum dipercaya menduduki jabatan sebagai orang nomor dua di Polda Banten, nama Zain sudah sangat familiar bagi masyarakat Banten dan sekitarnya. Hal itu tak lepas dari kiprahnya saat mengemban amanah sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota. Selama memimpin di Tangerang, ia



dikenal responsif dan aktif turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga serta menjaga kondusivitas wilayah industri dan pemukiman.

Perjalanan karier Brigjen Zain terbilang cemerlang dengan deretan posisi strategis yang pernah diampunya. Ia tercatat pernah menjabat se-

bagai Kapolres Magelang Kota, Dirreskrim Polda Riau, hingga Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri sebelum akhirnya memimpin Polres Metro Tangerang Kota.

Pengalaman memimpin wilayah hukum Tangerang menjadi modal berharga bagi Zain dalam mendampingi

Kapolda Banten. Pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial, karakter masyarakat, hingga peta kerawanan wilayah di Banten diharapkan dapat memperkuat sinergi jajaran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten. ● (Egi)

GARA-GARA SITEPLAN

Atas temuan tersebut, puluhan perusahaan dipanggil oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pada Jumat (9/10/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, M. Irvan Maulana atau yang akrab disapa Ipeck, mengatakan bahwa pihaknya segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama 74 perusahaan, pihak Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

"Hari ini kami memanggil 74 perusahaan yang tidak memiliki izin. Dari hasil rapat, puluhan perusahaan tersebut rupanya tidak dapat mengurus izin karena masuk ke dalam siteplan PT Ferry Sonnevile," ungkapnya, Senin (12/10).

Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra tersebut sangat menyayangkan puluhan perusahaan di Gunung Putri tidak dapat mengurus izin. Kondisi

ini berpotensi merugikan daerah karena tidak memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

"Karena perizinan perusahaan tersebut tidak bisa diurus, tidak ada pemasukan untuk PAD. Oleh sebab itu, dalam dua minggu ke depan kami akan kembali menggelar rapat agar lahan tersebut dikeluarkan dari siteplan," tegasnya.

Ia pun menegaskan tidak akan mentoleransi siapa saja yang menyulitkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bogor.

"Kami akan menghitung berapa yang menjadi milik PT Ferry Sonnevile dan berapa yang menjadi hak masyarakat. Sebab, 74 perusahaan ini sebenarnya sudah memiliki sertifikat. Mereka tidak punya izin hanya karena masuk ke siteplan PT Ferry. Di situ saja PT Ferry sudah melanggar," tegas Ipeck.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi, menerangkan bahwa terganjalnya perusahaan untuk taat aturan diduga akibat adanya produk hukum pemerintah daerah yang tidak relevan dengan kondisi eksisting di lapangan.

"Kami akan melakukan verifikasi di lapangan terhadap siteplan PT Ferry. Artinya, ketika lahan tersebut bukan milik PT Ferry, lahan harus dikeluarkan dari siteplan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengurus perizinannya," terang Amin.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan demi memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat di wilayah Bumi Tegar Beriman.

"Dalam Perbup yang berlaku sudah jelas bahwa siteplan diterbitkan atas lahan-lahan yang memang milik pemohon. Langkah yang kami lakukan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para investor yang berinvestasi di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Sementara itu, Camat Gunung Putri, Indra Kurnia, memaparkan bahwa pemerintah tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat hanya karena adanya produk hukum yang seharusnya disesuaikan dengan aturan terbaru.

"Investasi tidak hanya menambah pendapatan asli daerah, tetapi juga menyerap tenaga kerja. Kami menunggu keputusan atas pembahasan yang telah dilakukan di DPRD bersama instansi terkait di Pemkab Bogor," pungkasnya.

● (Egi)

MAN CITY 'CUKUR' LIVERPOOL

LIVERPOOL |
Harian Merdeka

Erling Haaland menyebut, kemenangan Manchester City atas Liverpool sebagai pertarungan mental. Man City memaksimalkan keunggulan jumlah pemain untuk menang 3-0.

Man City di atas angin setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah (dua kartu kuning) pada pertandingan di Anfield, Minggu (11/10). Setelah skor 'kacamata' berlangsung selama lebih dari 60 menit, Haaland

akhirnya membuka keunggulan the Citizens.

Jeremy Doku dan Rayan Cherki masuk dari bangku cadangan sebelum gantian membobol gawang Liverpool, yang memastikan kemenangan Man City.

Tak bisa dipungkiri bahwa Manchester City melakoni pertandingan yang lebih berat baik secara fisik maupun psikis. Para pemain dibayangi kelelahan setelah jeda internasional yang panjang, plus menghadapi cemooan dari fans Liverpool usai dinyatakan bersalah dalam kasus manipulasi

keuangan klub.

"Tadi adalah pertandingan yang sulit, pertandingan yang berat. Namun, kami menunjukkan karakter yang luar biasa dari lini depan sampai belakang. Sangat bangga dengan semua orang," cetus Erling Haaland kepada Sky Sports.

"Anda ingin memenangi banyak pertandingan, sesederhana itu saja. Bermain dengan bagus, memainkan sepakbola yang bagus, dan memenangi

permainan," cetus superstar sepakbola Norwegia itu.

"Tadi itu adalah sebuah pertarungan mental, tidak pernah mudah kembali dari laga internasional. Aku merasa bangga karena kami tetap bersatu, kami kuat secara mental. Ada banyak pertandingan di depan, jadi sekarang waktunya memulihkan tenaga dan mulai lagi," dia menambahkan. **(dts)**



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**